

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Akuntansi sektor publik merupakan sistem informasi yang digunakan oleh lembaga-lembaga publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Saat ini, perhatian terhadap praktik akuntansi di lembaga-lembaga publik, baik pemerintah maupun non-pemerintah, semakin meningkat. Lembaga publik dituntut oleh masyarakat untuk mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah penyajian laporan keuangan yang jelas dan tepat waktu, yang mencerminkan akuntabilitas pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah.<sup>2</sup> Sejak tahun 1997, pemerintah telah menetapkan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam pengelolaan keuangan publik melalui berbagai peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam tata kelola keuangan pemerintahan yang baik, terutama untuk mewujudkan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya publik.<sup>3</sup> Pemerintah pusat maupun daerah diharapkan mampu menyajikan laporan keuangan yang jelas, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pihak-pihak berkepentingan lainnya. Penyajian laporan keuangan yang akuntabel akan mencerminkan tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan efektif, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

---

<sup>2</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, edisi kedua, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010). Hal. 32

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal. 20.

pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak lima kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga tahun anggaran 2023. Prestasi ini menunjukkan komitmen dan profesionalisme Pemkab Tulungagung dalam menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Capaian ini diperoleh melalui kerja sama seluruh jajaran pemerintahan, serta melalui evaluasi dan perbaikan yang didasarkan pada hasil pemeriksaan BPK, sehingga menjaga kepercayaan dan transparansi terhadap masyarakat.<sup>4</sup> Pemerintah diharapkan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mengatur penyusunan laporan berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kewajiban dan aset pemerintah. Namun, penerapan standar ini masih menghadapi kendala, terutama dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur, dan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas.

Penerapan akuntansi berbasis akrual di banyak pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Tulungagung, masih menghadapi kendala. Meskipun diatur dalam peraturan, sistem ini belum diterapkan secara optimal karena keterbatasan SDM yang terlatih, menghambat penyajian laporan keuangan yang akurat. Banyak aparatur pemerintahan yang belum memiliki keterampilan

---

<sup>4</sup> Pemerintah Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2010), hal. 3.

untuk mengelola keuangan secara akrual, sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi kurang transparan dan akuntabel.

Masalah lain adalah pencatatan aset yang tidak akurat. Banyak aset pemerintah yang tidak tercatat dengan benar atau tidak tercatat sama sekali, serta nilai yang tercatat seringkali tidak mencerminkan kondisi riil. Hal ini mengaburkan gambaran kondisi keuangan daerah dan menyulitkan pengelolaan sumber daya publik yang efektif.

Selain itu, verifikasi belanja daerah yang lemah menyebabkan ketidaksesuaian antara anggaran dan pengeluaran aktual, membuka peluang terjadinya penyimpangan. Kurangnya kesadaran terhadap akuntabilitas di kalangan aparatur juga memperburuk situasi, karena kesalahan dalam pengelolaan keuangan sulit terdeteksi dan diperbaiki. Untuk itu, perlu adanya peningkatan SDM, penguatan sistem informasi, dan pembudayaan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.

Kabupaten Tulungagung, seperti banyak daerah lain di Indonesia, memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana publik untuk program dan proyek pembangunan. Namun, beberapa masalah dalam pengelolaan keuangan daerah terungkap dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), seperti ketidaksesuaian dalam pencatatan aset dan verifikasi belanja daerah yang tidak memadai, yang mengindikasikan adanya masalah dalam akuntabilitas.<sup>5</sup> Kendala dalam penerapan akuntansi berbasis akrual menjadi salah satu faktor yang menghambat peningkatan kualitas laporan keuangan

---

<sup>5</sup> Badan Pemeriksa Keuangan, *Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah Tahun 2023* (Jakarta: BPK RI, 2023), hal. 15.

pemerintah daerah.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif. Transparansi dalam penyajian laporan keuangan memungkinkan pemerintah meningkatkan kepercayaan publik serta memastikan bahwa dana publik dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan pembangunan. Selain itu, peningkatan akuntabilitas juga sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap pemerintah daerah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.<sup>6</sup> Dengan demikian, pemerintah daerah harus terus berupaya memperbaiki pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak daerah di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel. Wijayanti menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan di bidang akuntansi sebagai salah satu faktor kunci dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan.<sup>7</sup> Sementara itu, Setyowati menyatakan bahwa penguasaan teknologi informasi serta penerapan sistem keuangan berbasis elektronik memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.<sup>8</sup> Namun, penelitian lain mengungkapkan bahwa meskipun standar akuntansi berbasis akrual telah diterapkan secara

---

<sup>6</sup> *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, hal. 20.

<sup>7</sup> Retno Wijayanti, “Peningkatan Kompetensi Aparatur dalam Penyusunan Laporan Keuangan,” *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2018, hal. 27.

<sup>8</sup> Lestari Setyowati, “Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah,” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Akuntansi*, 2019, hal. 45.

formal, implementasinya belum optimal, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan implementasi penyajian laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa penyajian yang transparan dan sesuai standar memainkan peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Penelitian Indrie Avisha meneliti pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, di mana hasilnya menunjukkan bahwa keterbukaan laporan keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.<sup>9</sup> Penelitian Indrie Avisha berbeda dengan penelitian ini berupa fokus penelitian pada pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap kepercayaan publik, menekankan bahwa keterbukaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah.

Selanjutnya, Ratna Timur dalam penelitiannya mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual di Kabupaten Lembata, menemukan bahwa meskipun SAP diterapkan, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur masih menjadi kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.<sup>10</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti penerapan standar akrual pada laporan keuangan, namun

---

<sup>9</sup> Indrie Avisha, *Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada BPKAD Kabupaten Bogor)* (Skripsi, Universitas Bosowa, 2020), hal. 59

<sup>10</sup> Ratna Timur, *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata* (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2017), hal. 41

berbeda dalam objek dan fokus yang spesifik pada kendala SDM.

Penelitian Wiguna juga memperkuat temuan ini dengan mengungkapkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Makassar berkontribusi langsung pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja keuangan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat.<sup>11</sup> Persamaannya adalah fokus pada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, tetapi perbedaannya terletak pada lokasi yang berfokus di Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi penyajian laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Secara khusus, penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan, tantangan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, serta upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk memperbaiki akuntabilitas keuangannya. Fokus penelitian ini adalah evaluasi penyajian laporan keuangan selama tiga tahun terakhir, serta analisis terhadap sistem pengawasan dan pengendalian keuangan di lingkup pemerintah daerah.

Penelitian ini juga terkait dengan pengelolaan keuangan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas merupakan salah satu pilar dari *good governance* yang sangat penting tidak hanya dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga dalam proses

---

<sup>11</sup> Wiguna, *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Makassar* (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2015), hal. 55

pengambilan keputusan di sektor publik secara umum. Oleh karena itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan tata kelola keuangan yang lebih baik di Kabupaten Tulungagung.

### **B. Fokus Penelitian**

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, permasalahan pada penelitian penulis akan membahas sebagai berikut

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tulungagung berdasarkan prinsip akuntansi?
2. Bagaimana peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan penyajian laporan keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung berdasarkan prinsip akuntansi.
2. Mengkaji peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Tulungagung.

### **D. Batasan Masalah**

Berikut adalah beberapa batasan masalah yang dapat dipertimbangkan untuk judul skripsi tersebut:

## 1. Fokus pada Kabupaten Tulungagung

- a. Penelitian ini akan terfokus pada Kabupaten Tulungagung sebagai wilayah studi. Hal ini berarti temuannya tidak dapat digeneralisasikan secara langsung ke daerah lain.
- b. Data dan informasi yang dikumpulkan akan spesifik untuk Kabupaten Tulungagung, seperti laporan keuangan daerah, tingkat aksesibilitas, dan persepsi akuntabilitas di wilayah tersebut.

## 2. Periode Waktu Penelitian

- a. Penelitian ini perlu menentukan periode waktu yang akan dianalisis, misalnya tahun 2021-2023. Hal ini penting untuk memahami tren dan perkembangan dalam penyajian, aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan di Kabupaten Tulungagung selama periode tersebut.

## 3. Variabel Penelitian

Penelitian ini perlu mendefinisikan variabel yang akan diukur, seperti:

- a. Penyajian Laporan Keuangan Daerah: Kualitas penyajian laporan keuangan, termasuk kelengkapan, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi.
- b. Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan: Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat.

#### 4. Aspek yang Dianalisis

- a. Penelitian ini perlu fokus pada aspek-aspek tertentu dalam penyajian, dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan yang akan dianalisis.
- b. Hal ini dapat mencakup analisis rasio keuangan, kepatuhan terhadap standar akuntansi, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin disampaikan dan dicapai dari penulis, maka diharapkan pada penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak sebagaimana manfaat tersebut dalam teoritis maupun manfaat praktis. Berikut adalah pemaparan manfaat penelitian ini yang akan dituangkan oleh penulis diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis maka diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan yang khasanah intelektual yang umumnya dapat menambah dan memperluas wawasan mengenai akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu akademik di bidang akuntansi publik dan

tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam pendalaman materi ajar yang berkaitan dengan akuntabilitas serta penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan daerah, yang dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa untuk memperdalam pemahaman di bidang ini.

b. Bagi Lembaga Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi praktis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Rekomendasi yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan di masa depan, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di daerah lain. Penelitian ini juga membuka ruang untuk eksplorasi topik-topik terkait, sehingga proses pembelajaran dan penelitian di bidang akuntansi publik dan tata kelola pemerintahan dapat terus berkembang dan menghasilkan temuan yang lebih komprehensif di masa depan.

## **F. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah ini memberikan batasan yang jelas untuk istilah kunci yang digunakan dalam penelitian, sehingga cakupan dan fokus penelitian dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

### **1. Implementasi**

Implementasi adalah proses pelaksanaan suatu konsep, kebijakan, atau program ke dalam tindakan nyata.<sup>12</sup> Dalam konteks penelitian ini, implementasi merujuk pada penerapan penyajian laporan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

### **2. Penyajian Laporan Keuangan**

Penyajian laporan keuangan adalah proses menyusun dan menampilkan informasi keuangan yang menggambarkan posisi dan kinerja keuangan suatu entitas dalam satu periode.<sup>13</sup> Laporan ini disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku dan ditujukan untuk memberikan informasi yang relevan dan andal bagi para pemangku kepentingan.

### **3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *KBBI Daring*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024), diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

<sup>13</sup> Standar Akuntansi Pemerintahan, *Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*, (Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

publik. Ini mencakup proses penataan, pencatatan, dan pelaporan anggaran yang dapat dipantau oleh masyarakat.<sup>14</sup>

#### 4. Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah entitas pemerintahan daerah yang menjadi objek studi dalam penelitian ini, dengan tugas utama mengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.<sup>15</sup>

### G. Sistematika Penulisan

**Bab I Pendahuluan**, bab ini membahas latar belakang masalah mengenai pentingnya akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Tulungagung, perumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dari penelitian ini, serta manfaat penelitian bagi pemerintah dan akademisi. Definisi istilah dan sistematika penulisan juga dijelaskan untuk mempermudah pembaca memahami arah penelitian ini.

**Bab II Kajian Pustaka**, bab ini menguraikan teori-teori besar seperti akuntabilitas keuangan publik dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teori dan kajian pustaka ini digunakan untuk menganalisis temuan lapangan dan mendukung konstruksi teori baru yang mungkin dihasilkan dari penelitian.

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2006).

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014).

**Bab III Metode Penelitian**, bab ini menjelaskan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian, lokasi dan subjek penelitian, kehadiran peneliti, teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dokumentasi), teknik analisis data, serta proses pengecekan keabsahan temuan. Tahap-tahap penelitian juga dijelaskan untuk memberikan gambaran tentang proses penelitian dari awal hingga akhir.

**Bab IV Hasil Penelitian**, bab ini memaparkan hasil dari pengamatan lapangan dan wawancara dengan informan di Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Temuan utama terkait implementasi penyajian laporan keuangan yang berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan disajikan secara rinci berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

**Bab V Pembahasan**, bab ini membahas temuan penelitian dengan mengaitkan teori-teori akuntansi pemerintahan dan penelitian terdahulu, serta memberikan interpretasi atas hasil yang diperoleh. Implikasi temuan terhadap praktik pengelolaan keuangan di Kabupaten Tulungagung juga diuraikan, beserta saran untuk perbaikan lebih lanjut.

**Bab VI Penutup**, bab ini merangkum kesimpulan dari penelitian terkait bagaimana penyajian laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Tulungagung, serta memberikan saran praktis untuk pemerintah daerah dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut di masa depan.